

**LAPORAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
TRIWULAN II TAHUN 2022**



PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA KELAS II

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, telah disusunnya Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Triwulan II Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Semarang. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survey Persepsi Anti Korupsi kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survey Persepsi Anti Korupsi dapat menggunakan metode dan teknik survey yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Semarang melaksanakan survey kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Persepsi Anti Korupsi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik sekaligus persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008.

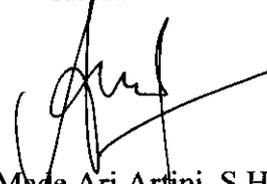
Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Tim Survey maka disusun Laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri Semarang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil survey ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Semarang dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan pengadilan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih efektif dan efisien.

Demikian Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Triwulan II Tahun 2022 ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Juni 2022

Kepua Tim



Ni Made Ari Artini, S.H.
Nip. 198404242011012017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Rencana Kerja Pelaksanaan	4
D. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	4
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	5
A. Metodologi Survei	5
B. Teknik Pengumpulan Data	5
C. Teknik Analisa Data	5
D. Variabel Pengukuran IPK	5
BAB III PROFIL RESPONDEN	7
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	9
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	17
DAFTAR PUSTAKA	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. MAKSUD dan TUJUAN

Survey Persepsi Anti Korupsi ini bertujuan untuk mengukur persepsi korupsi pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Semarang.

Adapun Tujuan Survey Persepsi Anti Korupsi adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran yang obyektif mengenai kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna Pengadilan.
2. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Pimpinan sebagai dasar menentukan tindaklanjut dan upaya perbaikan untuk meningkatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Semarang.

C. RENCANA KERJA PELAKSANAAN

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 1 April - 30 Juni 2022 dengan menetapkan target Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,82 (*tiga koma delapan puluh dua*)

D. TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Tahapan yang dilakukan dalam melakukan survey ini adalah:

1. Tim survey menentukan metode survey.
2. Tim survey membuat instrument berupa kuisisioner.
3. Tim survey memperbanyak kuisisioner, menentukan jadwal pelaksanaan survey.
4. Tim survey melakukan survey sesuai jadwal.
5. Kuisisioner yang telah diisi dikumpulkan oleh petugas diserahkan kepada ketua tim survey.
6. Tim survey menganalisa kuisisioner yang sudah terisi.
7. Tim survey menyajikan hasil analisa dalam bentuk deskriptif.
8. Hasil analisa diserahkan kepada MR.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. METODOLOGI SURVEI

Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif yang datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik dan sebagai data pendukung dipakai data kualitatif.

B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data pada penelitian ini diambil dengan instrument berupa kuesioner dengan jawaban tertutup dan terbuka.

Sebagai sample pada penelitian ini berjumlah 94 orang responden yang di ambil secara *simple random sampling* terhadap pengguna Pengadilan yang telah mendapatkan pelayanan, terdiri dari:

1. PNS
2. TNI
3. POLRI
4. Swasta
5. Wirausaha
6. Tenaga Kontrak
7. Lainnya

C. TEKNIK ANALISA DATA

Setelah data terkumpul data pada penelitian ini dianalisis dengan analisis statistik deskriptif.

D. VARIABEL PENGUKURAN IPK

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Persepsi Anti Korupsi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 10 ruang lingkup antara lain:

1. Manipulasi Peraturan

4. Transaksi Biaya
5. Biaya Tambahan
6. Hadiah
7. Transparasi Biaya
8. Percaloan
9. Perbuatan Curang
10. Transaksi Rahasia

BAB III PROFIL RESPONDEN

a. Umur Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	17 Tahun s/d 30 Tahun	37	39,36
2	31 Tahun s/d 40 Tahun	29	30,85
3	41 Tahun s/d 50 Tahun	17	18,09
4	51 Tahun s/d 60 Tahun	7	7,45
5	Diatas 61 Tahun	4	4,26
		94	100,00

Mayoritas responden ini berumur 17 tahun sampai dengan 30 tahun dengan jumlah 37 orang dari total 94 responden (39,36%).

b. Jenis Kelamin Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	Laki-laki	55	58,51
2	Perempuan	39	41,49
		94	100,00

Mayoritas responden ini berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 55 orang dari total 94 responden (58,51%).

c. Pendidikan Terakhir Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	Tidak / Belum Sekolah	1	1,06
2	SD	9	9,57
3	SMP	9	9,57
4	SMU	37	39,36
5	Diploma 1	1	1,06
6	Diploma 2	0	0,00
7	Diploma 3	1	1,06
8	S1	30	31,91
9	S2	6	6,38
10	S3	0	0,00

Mayoritas Pendidikan Terakhir Responden disini adalah SMU yang berjumlah 37 orang dari total responden 94 orang (39,36%).

d. Pekerjaan Utama Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	PNS	11	11,70
2	TNI	1	1,06
3	POLRI	5	5,32
4	SWASTA	38	40,43
5	WIRUSAHA	5	5,32
6	TENAGA KONTRAK	2	2,13
7	LAINNYA	32	34,04
		94	100,00

Mayoritas Pekerjaan Utama Responden adalah Swasta yaitu 38 orang dari total responden 94 orang (40,43%).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Berdasarkan hasil analisis fakta di lapangan di peroleh Survey Persepsi Anti Korupsi Unit Pelayanan sebesar **3,84**. Analisis selanjutnya disajikan berdasarkan masing - masing ruang lingkup pelayanan:

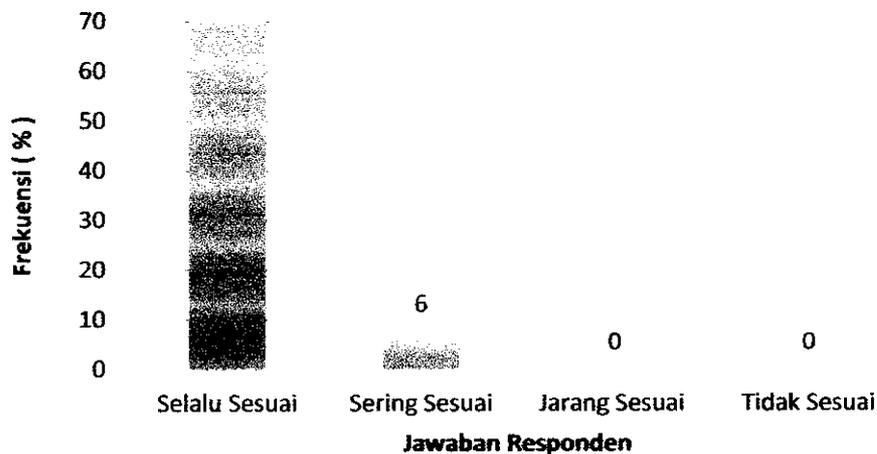
1. Indikator Manipulasi Peraturan

Hasil analisis pada ruang lingkup secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,94. Indeks dapat diartikan bahwa pelayanan petugas bersih dari Manipulasi Peraturan.

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Selalu Sesuai	4	88	93,62
2	Sering Sesuai	3	6	6,38
3	Jarang Sesuai	2	0	0,00
4	Tidak Sesuai	1	0	0,00
JUMLAH			94	100,00

Manipulasi Peraturan

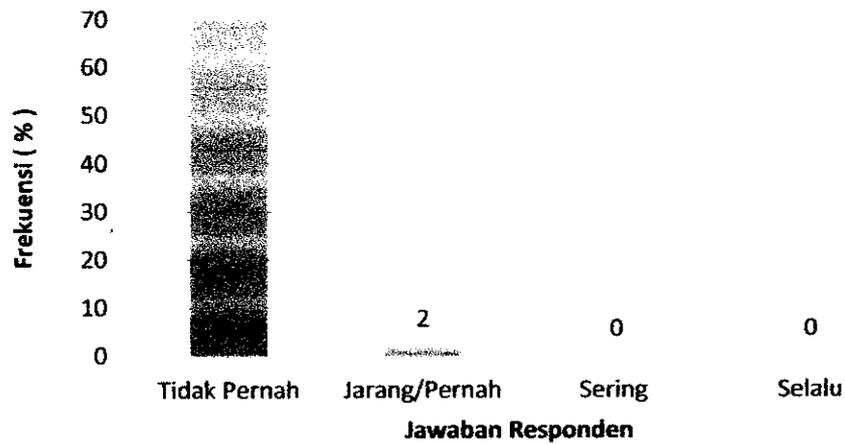


2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Hasil analisis pada ruang lingkup secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	92	97,87
2	Jarang/Pernah	3	2	2,13
3	Sering	2	0	0,00
4	Selalu	1	0	0,00
JUMLAH			94	100,00

Penyalahgunaan Jabatan



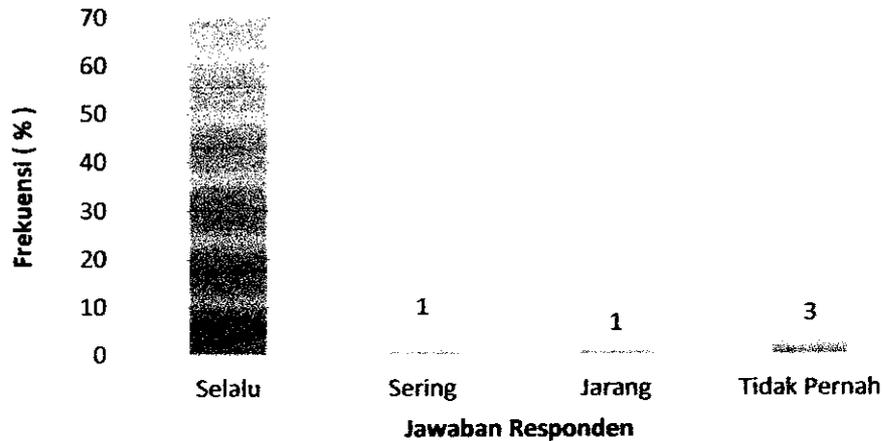
Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (97,87%) menyatakan memperoleh layanan di Pengadilan Negeri Semarang secara cepat dan mudah tanpa memberi imbalan kepada petugas. Indeks Indikator Penyalahgunaan Jabatan adalah 3,98.

3. Indikator Menjual Pengaruh

Hasil analisis pada Indikator Menjual Pengaruh secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Selalu	4	89	94,68
2	Sering	3	1	1,06
3	Jarang	2	1	1,06
4	Tidak Pernah	1	3	3,19
JUMLAH			94	100,00

Menjual Pengaruh



Tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (94,68%) menyatakan tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara.

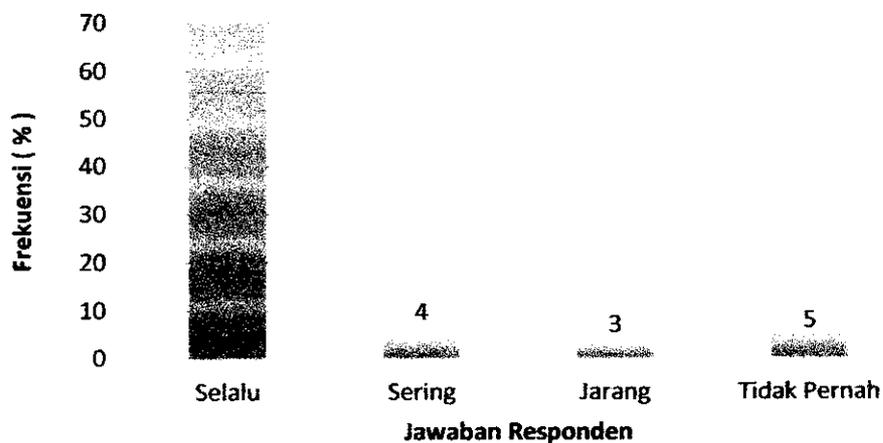
Indeks Indikator Menjual Pengaruh adalah 3,87.

4. Indikator Transaksi Biaya

Hasil analisis pada Indikator Transaksi Biaya secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Selalu	4	82	87,23
2	Sering	3	4	4,26
3	Jarang	2	3	3,19
4	Tidak Pernah	1	5	5,32
JUMLAH			94	100,00

Transaksi Biaya



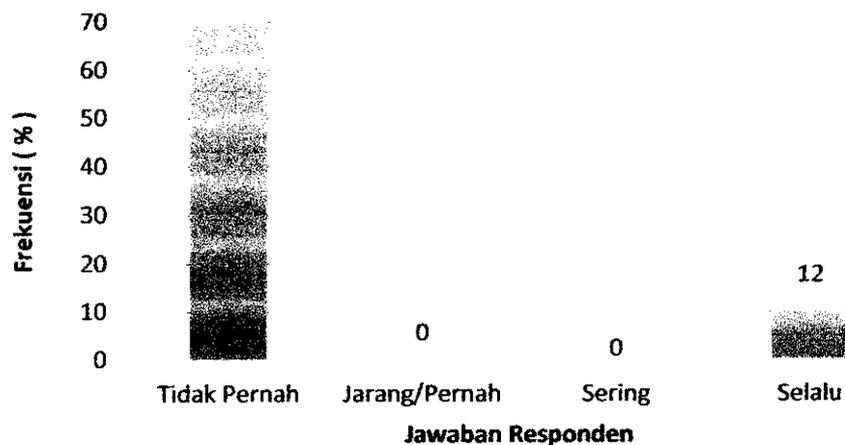
Tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (87,23%) menyatakan mudah dalam mendapatkan informasi tentang biaya/tarif baik melalui

5. Indikator Biaya Tambahan

Hasil analisis pada ruang lingkup Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	82	87,23
2	Jarang/Pernah	3	0	0,00
3	Sering	2	0	0,00
4	Selalu	1	12	12,77
JUMLAH			94	100,00

Biaya Tambahan



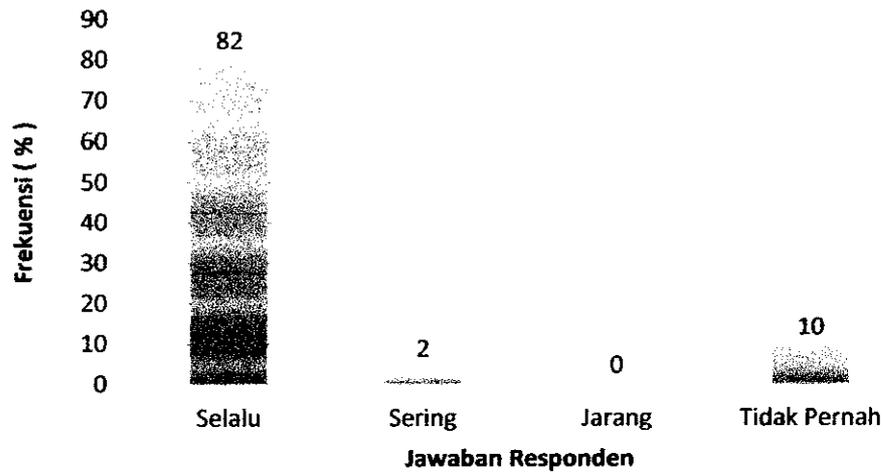
Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (87,23%) menyatakan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa biaya tambahan. Indeks Indikator Biaya Tambahan adalah 3,62.

6. Indikator Hadiah

Hasil analisis pada Indikator Hadiah secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Selalu	4	82	87,23
2	Sering	3	2	2,13
3	Jarang	2	0	0,00
4	Tidak Pernah	1	10	10,64
JUMLAH			94	100,00

Hadiah



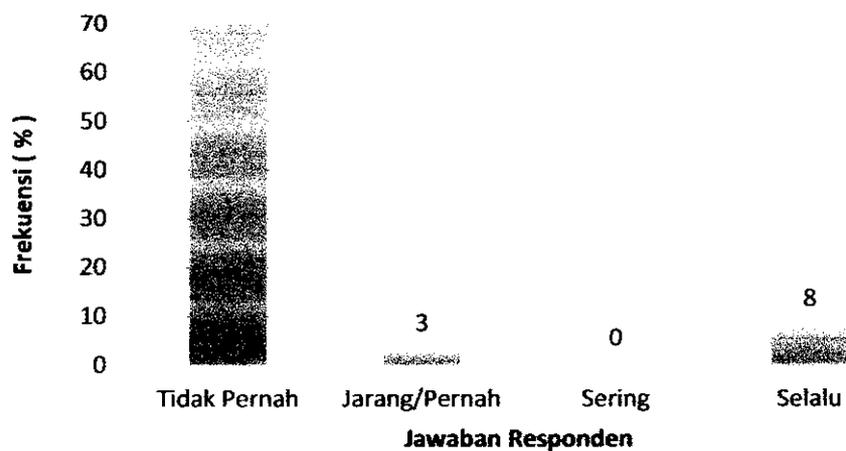
Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (87,23%) menyatakan tidak pernah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta). Indeks Indikator Hadiah adalah 3,66.

7. Indikator Transparansi Biaya

Hasil analisis pada ruang lingkup Perilaku Pelaksana Pelayanan secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	83	88,30
2	Jarang/Pernah	3	3	3,19
3	Sering	2	0	0,00
4	Selalu	1	8	8,51
JUMLAH			94	100,00

Transparansi Biaya



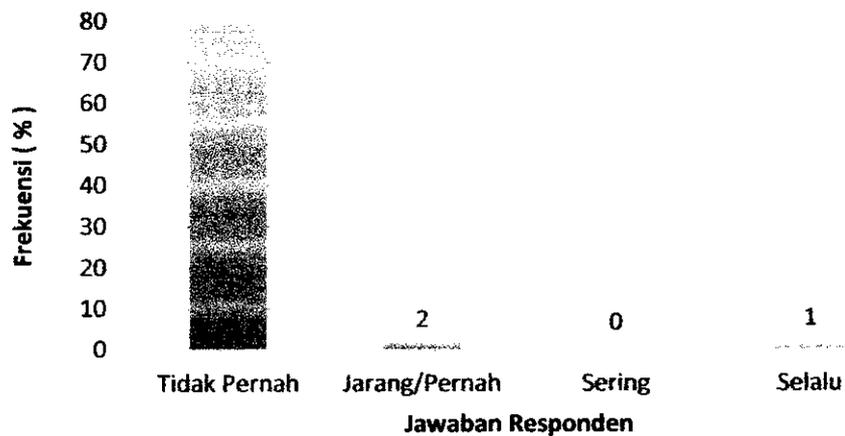
Tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (88,30%)

8. Indikator Percaloan

Hasil analisis pada Indikator Percaloan secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	91	96,81
2	Jarang/Pernah	3	2	2,13
3	Sering	2	0	0,00
4	Selalu	1	1	1,06
JUMLAH			94	100,00

Percaloan



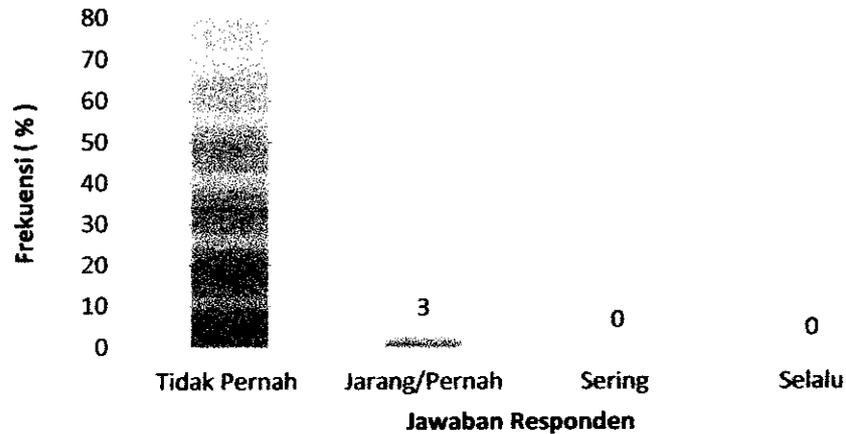
Tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden(96,81%) tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan. Indeks Indikator Percaloan adalah 3,95.

9. Indikator Perbuatan Curang

Hasil analisis pada ruang lingkup Indikator Perbuatan Curang secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	91	96,81
2	Jarang/Pernah	3	3	3,19
3	Sering	2	0	0,00
4	Selalu	1	0	0,00
JUMLAH			94	100,00

Perbuatan Curang



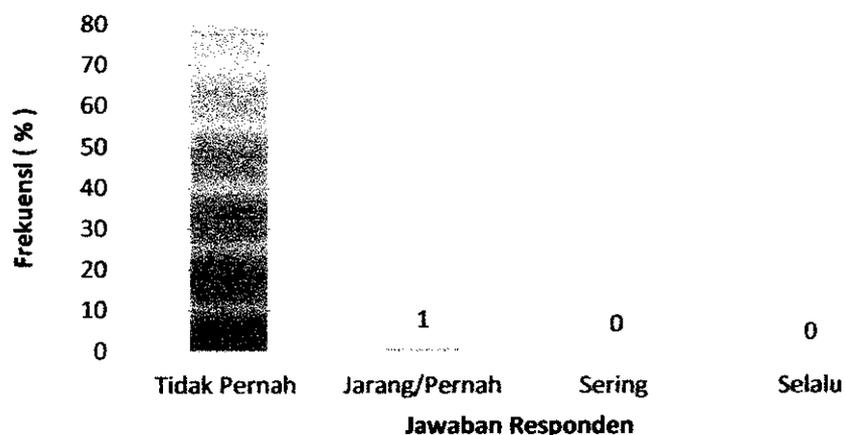
Tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas (96,81%) responden menyatakan tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan. Indeks Indikator Perbuatan Curang adalah 3,97.

10. Indikator Transaksi Rahasia

Hasil analisis pada ruang lingkup Indikator Transaksi Rahasia secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	93	98,94
2	Jarang/Pernah	3	1	1,06
3	Sering	2	0	0,00
4	Selalu	1	0	0,00
JUMLAH			94	100,00

Transaksi Rahasia



Tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas (98,94%) responden menyatakan tidak pernah mendengar praktek melalui Hakim/Panitera/Staf Pengadilan

Dalam survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan ini terdapat beberapa responden yang memberikan saran dan masukan sebagai berikut :

- 1 Pelayanan sudah sangat baik, dan saran untuk sistem aplikasi agar lebih ditingkatkan lagi
- 2 sudah baik, mohon dipertahankan
- 3 Selalu tingkatkan kinerja pelayanan
- 4 sangat sopan dan baik
- 5 sangat bagus dengan pelayanannya.. saya ucapkan terimakasih banyak.
- 6 pengadilan negeri klungkung selalu memberikan pelayanan yang baik
- 7 PELAYANAN SUDAH BAGUS, MOHON UNTUK DITINGKATKAN
- 8 peyanan terus ditingkatkan lagi.
- 9 pelayanan yang baik.
- 10 baik
- 11 pelayanan yg cukup baik dan Tertata di pengadilan negeri klungkung, seperti di pn denpasar
- 12 pelayanan sangat baik
- 13 merasa puas
- 14 tetap dipertahankan
- 15 baik dan ramah
- 16 mohon untuk ditingkatkan lagi
- 17 tetep menjaga kedisiplinan
- 18 pelayanannya baik
- 19 pelayanan sangat bagus dan cepat, mohon untuk ditingkatkan lagi
- 20 tetap pertahankan
- 21 PROSES PELAYANAN CEPAT DAN BAGUS
- 22 Pelayanan sangat baik, proses cepat, mohon dipertahankan
- 23 Pelayanannya sudah bagus semoga semakin bagus
- 24 terimakasih .
- 25 Sangat bagus dan layanan cepat
- 26 PELAYANAN SUDAH BAGUS MOHON UNTUK DIPERTAHANKAN
- 27 LAYANANNYA SANGAT BAGUS
- 28 pelayanan terbaik dan prima
- 29 Pelayanan cepat, agar lebih ditingkatkan lagi
- 30 PELAYANAN CEPAT DAN BAGUS
- 31 petugas sangat ramah, proses pelayanan cepat, mohon untuk dipertahankan
- 32 proses pelayanan cepat
- 33 PETUGASNYA RAMAH, PELAYANANNYA BAGUS, MOHON LEBIH DITINGKATKAN LAGI
- 34 pelayanan sangat memuaskan tetap semangat dan selalu membela kepentingan masvarakat kecil.

- 36 PELAYANAN SUDAH BAGUS DAN CEPAT, MOHON UNTUK
DIPERTAHANKAN
- 37 Pelayanan sdh sangat baik dan kedepannya ditingkatkan dan dipertahankan
- 38 baik
- 39 pelayanan sudah optimal dan lancar
- 40 Sangat Baik
- 41 sangat baik dan mohon dipertahankan
- 42 Petugasnya ramah, pelayanan cepat dan hasilnya memuaskan,, mohon untuk
dipertahankan
- 43 terimakasih sudah memberikan layanan terbaik untuk kami selaku masyarakat
- 44 PELAYANAN YANG SAYA TERIMA SANGAT BAIK, SARAN SAYA
MOHON DIPERTAHANKAN LAGI
- 45 PELAYANAN SANGAT BAIK,DAN CEPAT, MOHON DIPERTAHANKAN
LAGI
- 46 Pelayanan sudah baik
- 47 PELAYANAN BAGUS, PETUGAS RAMAH
- 48 DIPERTAHANKAN
- 49 Pelayanan yg sangat baik
- 50 ramah
- 51 pelayanan bagus
- 52 pelayanan cepat dan bagus
- 53 pelayanan cepat
- 54 bagus dan nyaman
- 55 pertahankan
- 56 pelayanan informasi jelas dan mudah.
- 57 pelayananya sesuai prosedur
- 58 pelayanan cepat
- 59 cepat dan ramah
- 60 memuaskan...
- 61 Untuk intergritas pelayanan sudah bagus. dan lebih ditingkatkan
- 62 Kesan saya untuk pelayanan pengadilan semarapura ini sangat memuaskan
- 63 PELAYANAN BAGUS DAN CEPAT
- 64 Pelayanannya sangat ramah, bagus dan cepat
- 65 pelayanan cepat dan ramah
- 66 PELAYANAN SUDAH BAGUS, MOHON DITINGKATKAN LAGI
- 67 PELAYANAN SUDAH BAGUS DAN CEPAT
- 68 PELAYANAN DI PENGADILAN SUDAH BAGUS ,CEPAT DAN
TRANSPARAN
- 69 pelayanan pada bagian perdata sangat bagus dan cepat
- 70 pelayanan sangat bagus dan cepat

- 72 pelayanan pada pengadilan sangat bagus dan cepat
- 73 SANGAT BAGUS
- 74 bagus
- 75 pertahankan
- 76 pelayanannya cukup ramah dan baik
- 77 pelayanan yang diberikan sangat baik dan informasi yang disampaikan jelas dan terperinci.
- 78 Pelayanan dibagian hukum sangat bagus dan cepat mohon untuk ditingkatkan lagi
- 79 sangat baik
- 80 PELAYANAN SANGAT BAIK DAN PROSESNYA CEPAT
- 81 PELAYANAN SANGAT BAIK DAN PROSESNYA CEPAT
- 82 PELAYANAN BAGUS DAN CEPAT
- 83 Pelayanan sudah sangat baik, cepat dan transparan, mohon untuk lebih ditingkatkan
- 84 pelayanan sangat memuaskan dan sangat membantu
- 85 pelayanan sangat bagus
- 86 mohon agar pelayanan yang baik ini dapat dipertahankan.
- 87 pelayanan pada pengadilan sangat baik dan ramah
- 88 sangat puas
- 89 baik
- 90 petugas ramah
- 91 kesan saya dalam melalui proses peradilan di pengadilan negeri semarang pelayananannya sangat baik
- 92 PELAYANAN SUDAH SANGAT BAGUS DAN RAMAH.. MOHON DIPERTAHANKAN
- 93 TERIMA KASIH KARENA PELAYANAN SIDANG CEPAT SELESAI
- 94 TERIMA KASIH SAYA SUDAH MENDAPAT LAYANAN YANG BAIK

Nilai Rata-Rata Per Unsur Indikator

No	Unsur Korupsi	Nilai Rata-rata Per Unsur
U1	Manipulasi Peraturan	3,94
U2	Penyalahgunaan Jabatan	3,98
U3	Menjual Pengaruh	3,87
U4	Transaksi Biaya	3,73
U5	Biaya Tambahan	3,62
U6	Hadiah	3,66
U7	Transparasi Biaya	3,71
U8	Percaloan	3,95
U9	Perbuatan Curang	3,97
U10	Transaksi Rahasia	3,99
Indeks Persepsi Anti Korupsi		3,84

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN DAN SARAN

Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Semarang Triwulan II tahun 2022 adalah 3,84. Hal ini mencerminkan citra yang baik dari masyarakat dan memberikan optimisme semakin meningkatnya kepercayaan publik terhadap Pengadilan Negeri Semarang.

B. SARAN

Upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan harus pula diimbangi dengan menjaga integritas yang tinggi dari segenap aparatur Pengadilan Negeri Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Prof.drs.Sutrisno Hadi, MA. Statistik Jilid 2. Penerbit ANDI. Yogyakarta. 1977
2. Prof.drs.Sutrisno Hadi, MA. Statistik Jilid 3. Penerbit ANDI. Yogyakarta. 1977
3. Drs.Ridwan, M.B.A. Dasar – dasar Statistik. Penerbit Alfa Beta. Semarang. 2008
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Persepsi Korupsi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.